

Diskriminasi Sosial Terhadap Keluarga Eks-Tapol dalam Novel Namaku Alam Karya Leila S. Chudori

Social Discrimination Against Former Political Prisoner Families in Leila S. Chudori's Novel Namaku Alam: A Sociological Literary Analysis

Intan Permatasari⁽¹⁾, Sapta Arif Nur Wahyudin^{(2)*}, Sutejo⁽³⁾

^{1,2,3} Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, STKIP PGRI Ponorogo

*email: sapta@stkipgriponorogo.ac.id

Histori Artikel:

Diajukan:
16/04/2026

Diterima:
30/04/2026

Diterbitkan:
31/05/2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji representasi diskriminasi sosial terhadap keluarga eks-tahanan politik (eks-Tapol) dalam novel *Namaku Alam* karya Leila S. Chudori. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode sosiologi sastra, yang diperkuat melalui integrasi teori stigma dan konsep memori kolektif. Data dikumpulkan melalui teknik studi pustaka dan dianalisis menggunakan model reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa diskriminasi dalam novel ini terwujud dalam empat bentuk utama: diskriminasi simbolik (stereotip dan pelabelan negatif), diskriminasi struktural (ketimpangan relasi sosial berdasarkan garis keturunan), diskriminasi institusional (ketidakadilan sistem pendidikan dan aparat negara), serta diskriminasi kultural (normalisasi kekerasan domestik dan budaya diam). Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa karya sastra tidak sekadar berfungsi sebagai media dokumentasi trauma sejarah antargenerasi, melainkan menjadi instrumen kritis yang menggugat dominasi narasi sejarah resmi sekaligus membuka ruang rekonsiliasi dan kesadaran kritis kolektif di masyarakat.

Kata Kunci: Diskriminasi Sosial, Eks-Tapol, Memori Kolektif, Sosiologi Sastra, Stigma

ABSTRACT

This study examines the representation of social discrimination against the families of former political prisoners (eks-Tapol) in Leila S. Chudori's novel *Namaku Alam*. This study employs a descriptive qualitative method with a sociological literary approach, integrated with stigma theory and the concept of collective memory. Data were collected through literature review and analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings reveal that discrimination in the novel manifests in four principal forms: symbolic discrimination (negative stereotyping and labeling), structural discrimination (unequal social relations determined by lineage), institutional discrimination (inequitable treatment by educational institutions and state apparatus), and cultural discrimination (normalization of domestic violence and a culture of silence). The implications of this study indicate that literature does not merely serve as a medium for documenting intergenerational historical trauma, but functions as a critical instrument that challenges the hegemony of official historical narratives, while simultaneously opening spaces for reconciliation and cultivating collective critical consciousness within society.

Keywords: Social Discrimination, Former Political Prisoners, Stigma, Collective Memory, Literary Sociolog

Keywords: Social Discrimination, Former Political Prisoners, Stigma, Collective Memory, Literary Sociolog.

PENDAHULUAN

Isu diskriminasi sosial terhadap keluarga eks-tapol (tahanan politik) merupakan topik yang kompleks dan penuh luka sejarah. Indonesia memiliki sejarah kelam yang menyangkut tragedi politik 1965–1966, di mana

ratusan ribu orang dituduh terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) tanpa proses hukum yang adil. Stigmatisasi terhadap mereka tidak berhenti pada individu yang dituduh, tetapi meluas kepada anggota keluarga mereka, bahkan hingga generasi berikutnya. Diskriminasi ini

termanifestasi dalam bentuk pengucilan sosial, pembatasan akses pendidikan, dan perlakuan administratif yang tidak adil (Cribb R, 2000: 45-49).

Pasca-Orde Baru, narasi tentang keluarga eks-tapol mulai mendapatkan ruang dalam diskursus publik, terutama melalui karya-karya sastra yang mengangkat kembali suara-suara yang dibungkam. Kita mengenal Martin Aleida, seorang sastrawan yang menguak luka sejarah '65. Tak terhitung karya Martin Aleida telah menjadi dokumen fiksi sejarah yang tidak lekang oleh waktu. Misalnya, kumpulan cerita pendek *Kata-Kata Membasuh Luka* (Aleida, 2019) menghimpun berbagai konflik yang terjadi oleh korban dan keluarga korban tragedi '65. Ahmad Tohari (2022) mengabadikan tragedi '65 dalam bingkai konflik yang dialami oleh ronggeng bernama Srintil dalam trilogi *Ronggeng Dukuh Paruk*. Purnamasari (2016) dalam novelnya berjudul *Kalamata* menggambarkan penderitaan seorang dalang perempuan di Bali yang menjadi korban tragedi '65 hingga mengalami dimensia akut. Aleida, Tohari, dan Purnamasari merupakan tiga dari sekian banyak pengarang Indonesia yang merekam luka tragedi pasca '65 dalam kemasan estetik karya sastra. Mereka secara lantang menyuarakan hak dan menuntut keadilan yang dialami korban dalam bingkai fiksi sejarah.

Di antara nama-nama besar tersebut, Leila S. Chudori merupakan salah satu penulis perempuan yang menggunakan peristiwa sejarah sebagai benang merah peristiwa pada karyanya. Kita sebut saja novel *Namaku Alam* (Chudori, 2024). Novel ini berpusat pada tokoh Segara Alam yang merupakan anak dari eks-Tapol, lebih rinci Alam hidup dalam bayang-bayang Sejarah kelam dan tumbuh ditengah stigma "anak pengkhianat negara" karena ayahnya yang diduga teribat dalam peristiwa 1965. Novel ini berlatar belakang tahun 1965-1982, masa Orde Baru yang penuh dengan ketidakbebasan dan represifitas. Alam, yang memiliki kemampuan *photographic memory*,

mengingat detail-detail traumatis dari masa kecilnya, seperti diskriminasi dan perundungan. Ia tumbuh dengan beban stigma "keluarga tapol" dan "pengkhianat negara", yang membuatnya sering terlibat perkelahian dan bergulat dengan emosinya.

Melalui novel *Namaku Alam*, Arif (2023) mengatakan bahwa pentingnya mempelajari sejarah sebagai alat memahami fragmen kehidupan. Konflik tragedi sejarah yang ditulis oleh Leila seakan memberikan pesan bahwa meski penulisan sejarah kerap kali bernuansa politis, penulisan dokumen sejarah seharusnya tidak pernah selesai. Tokoh Alam melalui perkumpulan Para Pencatat Sejarah seakan mengusung napas perjuangan ini, yaitu memurnikan dokumen sejarah dari unsur politik. Novel ini hadir sebagai salah satu representasi penting dalam lanskap sastra Indonesia pascareformasi. Novel ini secara eksplisit menyoroti dampak diskriminasi sosial terhadap keluarga eks-Tahanan Politik (Tapol) pasca-Peristiwa 1965. Inilah yang menjadi daya tarik utama dan alasan pemilihan objek penelitian ini.

Pada novel ini, Leila menggunakan pendekatan humanistik yang menyelami krisis identitas, diskriminasi sosial, dan benturan antara sejarah dan ingatan personal. Leila tidak hanya menggambarkan peristiwa politik sebagai latar, tetapi menjadikan trauma sejarah sebagai jantung cerita yang membentuk karakter dan relasi sosial tokoh-tokohnya. Sastra, dalam hal ini, menjadi arena penting dalam membongkar narasi yang selama ini ditekan negara dan membuka ruang diskusi tentang keadilan sosial dan memori kolektif (1980).

Fenomena diskriminasi terhadap keluarga eks-Tapol tidak hanya merupakan masalah masa lalu, tetapi terus mewujud dalam berbagai bentuk penyingkiran sosial dan pembatasan akses terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, hingga hak politik. Penelitian oleh Wahyuningroem (2013) menunjukkan bahwa ingatan kolektif bangsa tentang peristiwa 1965 masih dibentuk oleh narasi negara yang

menstigmatisasi eks-Tapol dan keluarganya sebagai “musuh bangsa”. Novel *Namaku Alam* mengangkat kembali isu tersebut dengan pendekatan personal dan emosional, yang tidak hanya mengkritik struktur sosial, tetapi juga memperlihatkan efek jangka panjang dari stigmatisasi politik terhadap identitas generasi berikutnya.

Isu diskriminasi sosial terhadap eks-tapol merupakan tema penting dalam kajian sosiologi sastra, khususnya dalam melihat bagaimana karya sastra menjadi medium untuk memotret relasi antara kekuasaan, trauma, dan struktur sosial. Dalam konteks ini, novel *Namaku Alam* memfungsikan dirinya sebagai artefak budaya yang merekam memori kolektif masyarakat Indonesia terhadap peristiwa politik dan ketidakadilan historis. Novel ini memperlihatkan bagaimana pengalaman individu melalui karakter Alam beresonansi dengan dinamika sosial yang lebih luas. Dengan kata lain, sastra berfungsi sebagai ruang kritik sosial yang memungkinkan pembaca untuk memahami realitas sosial-politik dari perspektif yang lebih humanis.

Dalam kajian sastra, pendekatan sosiologi sastra memberikan kerangka penting untuk memahami hubungan antara karya sastra, struktur sosial, dan pengalaman historis masyarakat. Wellek & Warren (1994: 109) menekankan bahwa sastra adalah cermin masyarakat, tetapi juga merupakan konstruksi sosial yang dibentuk oleh ideologi, sejarah, dan kekuasaan. Oleh karena itu, analisis terhadap novel *Namaku Alam* memerlukan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial-politik Indonesia, khususnya pasca-Orde Baru.

Pendekatan sosiologi sastra dalam penelitian ini diperkuat oleh teori stigma dari Erving Goffman. Menurut Goffman (2009), stigma adalah atribut sosial yang mendiskreditkan seseorang, sehingga mereka dipandang “tidak normal” oleh masyarakat. Stigma bukan hanya menempel pada individu, tetapi diwariskan secara sosial kepada

kelompok dan keluarga. Hal ini sangat relevan dengan pengalaman keluarga eks-tapol dalam novel *Namaku Alam*, di mana keturunan juga menanggung beban sosial akibat sejarah politik orang tuanya. Alam, meskipun tidak terlibat langsung dalam sejarah 1965, tetap mengalami perlakuan diskriminatif akibat identitas keluarganya. Stigma ini ditampilkan dalam bentuk perundungan di sekolah, status sosial keluarga, dan perasaan terasing dari komunitas.

Selain teori stigma, kajian ini menggunakan konsep memori kolektif dari Halbwachs & Coser (2020), yang menjelaskan bagaimana ingatan tidak hanya bersifat individual, tetapi dibentuk secara sosial melalui keluarga, komunitas, dan negara. Memori kolektif tentang tragedi 1965 dalam novel *Namaku Alam* menjadi beban yang diwariskan dan dibentuk melalui cerita-cerita keluarga, arsip, dan pertemuan dengan orang-orang yang terkait dengan sejarah tersebut. Keluarga Alam menjadi simbol dari kelompok yang memelihara ingatan alternatif atas sejarah nasional. Melalui narasi keluarga, novel ini memperlihatkan bagaimana memori kolektif keluarga eks-tapol bersaing dengan memori resmi yang dibentuk oleh negara melalui pendidikan, media, dan lembaga politik. Konflik antara kedua jenis memori ini menciptakan ketegangan identitas yang kompleks.

Literatur tambahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan sosiologi sastra dari Laurensen & Swingewood (1972) yang memandang karya sastra sebagai cerminan dari struktur sosial yang melahirkannya. Sastra, dalam hal ini, tidak hanya menjadi media ekspresi estetika, tetapi juga media komunikasi sosial yang menggambarkan konflik kelas, ketimpangan kekuasaan, dan struktur diskriminatif. Pendekatan ini memperkuat argumen bahwa *Namaku Alam* dapat dibaca sebagai dokumen sosial yang mencerminkan ketidakadilan terhadap keluarga eks-Tapol dalam masyarakat pasca-Orde Baru.

Penelitian-penelitian sebelumnya

membahas konflik batin tokoh (Husna, dkk, 2025: 3-4) dan kepribadian id tokoh utama (Suwandhi & Raharjo, 2024: 2-3) dengan pendekatan psikologi sastra. Namun, belum ada yang secara khusus membedah diskriminasi sosial terhadap keluarga eks-tapol dalam narasi novel ini. Studi oleh Darliani, dkk. (2024: 8-10) menggunakan pendekatan sosiologi sastra untuk nilai sosial, tetapi tidak secara detail membahas bentuk diskriminasi sistemik terhadap keluarga eks-tapol. Hal ini menjadi celah penting dari sudut pandang kritik sosial dan historis. Namun, tidak banyak yang mengkaji bagaimana stigma sosial terhadap keluarga eks-tapol dikonstruksi dan diwariskan melalui narasi sastra. Padahal, pemahaman terhadap warisan stigma ini sangat penting untuk melihat dampak jangka panjang dari represi politik, serta bagaimana generasi muda menginternalisasi atau bahkan melawan narasi yang dominan. Maka dari itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan fokus khusus pada diskriminasi sosial terhadap keluarga eks-tapol menggunakan teori stigma dan memori kolektif secara terintegratif. Pendekatan ini belum banyak digunakan dalam kajian sebelumnya, sehingga menawarkan kontribusi baru dalam wacana literatur pasca-Orde Baru.

Secara garis besar, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana bentuk-bentuk diskriminasi sosial terhadap keluarga eks-tapol dikonstruksi dalam novel *Namaku Alam*. Dengan menggunakan teori stigma dan memori kolektif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru mengenai dinamika kekuasaan, trauma, dan rekonsiliasi sosial dalam masyarakat Indonesia kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan secara alamiah dan holistik (Sugiyono, 2017:9). Pendekatan ini

dipilih karena sesuai dengan karakter objek kajian, yaitu novel *Namaku Alam* karya Leila S. Chudori, yang mengangkat tema sosial-politik yang kompleks, khususnya isu diskriminasi terhadap keluarga eks-tapol. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk diskriminasi sosial secara mendalam dan menginterpretasikan makna simbolik serta nilai-nilai sosial dalam novel tersebut.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah novel *Namaku Alam* yang ditulis oleh Leila S. Chudori dan diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia pada tahun 2023. Data dalam penelitian ini berupa kutipan naratif, dialog antar tokoh, narasi penggambaran latar, serta simbol-simbol sosial dan historis yang berkaitan dengan diskriminasi terhadap eks-tapol. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dengan fokus pada pembacaan dan penelaahan teks novel secara menyeluruh. Selain itu, peneliti juga menggunakan beberapa sumber sekunder, seperti artikel ilmiah, jurnal, dan buku referensi yang relevan dengan tema diskriminasi sosial, teori stigma, serta memori kolektif.

Prosedur pengumpulan data dimulai dengan pembacaan intensif terhadap novel, pencatatan kutipan relevan, klasifikasi bentuk diskriminasi sosial (seperti diskriminasi simbolik, struktural, institusional, dan kultural), dan identifikasi narasi yang merepresentasikan trauma serta marginalisasi sosial. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikategorikan berdasarkan indikator teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu teori stigma dari Goffman (2009), konsep memori kolektif dari Halbwachs & Coser (2020), dan pendekatan sosiologi sastra menurut Wellek & Warren (1994).

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model Miles & Huberman (1994: 10-12) yang terdiri dari tiga langkah utama: (1) reduksi data, yakni proses pemilihan dan pemfokusan data dari teks novel yang relevan

dengan fokus penelitian; (2) penyajian data dalam bentuk narasi analitis yang disertai kutipan; dan (3) penarikan kesimpulan, yakni interpretasi atas bentuk diskriminasi sosial serta bagaimana ketidakadilan tersebut digambarkan secara literer dalam novel.

Validitas data dalam penelitian ini dijaga dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil pembacaan novel dengan literatur atau referensi lain yang mengkaji isu eks-tapol dan diskriminasi sosial, seperti artikel sejarah dan sosiologi. Sedangkan triangulasi teori dilakukan dengan menggabungkan beberapa teori seperti teori stigma, memori kolektif, dan sosiologi sastra agar pembahasan menjadi lebih komprehensif dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Diskriminasi Simbolik

Diskriminasi simbolik dalam novel *Namaku Alam* tercermin melalui bahasa yang merendahkan, label sosial seperti “anak komunis” atau “keluarga pecundang”, serta pengucilan dalam relasi keluarga besar dan masyarakat. Menurut Goffman (2009), stigma simbolik adalah proses di mana atribut sosial tertentu, misalnya afiliasi politik atau silsilah keluarga, digunakan untuk mendiskreditkan seseorang dari penerimaan sosial yang utuh. Hal ini membuat individu mengalami “identitas sosial yang rusak” (*spoiled identity*), di mana nama keluarga menjadi beban identitas kolektif yang diwariskan.

Konsep memori kolektif dari Halbwachs & Coser (2020) menekankan bahwa masyarakat menyusun dan mempertahankan narasi bersama tentang sejarah, yang menjadi dasar bagi terbentuknya stereotip dan label sosial. Dalam hal ini, masyarakat pasca-Orde Baru mewarisi narasi Orde Baru yang menempatkan eks-Tapol dan keturunannya sebagai pengkhianat, sehingga label dan hinaan terhadap Alam dibentuk bukan hanya oleh individu, tetapi oleh ingatan kolektif yang dominan.

Dari perspektif sosiologi sastra, diskriminasi simbolik ini diangkat Leila S. Chudori sebagai bagian dari struktur naratif yang mengungkap dominasi kekuasaan simbolik terhadap tokoh yang dimarginalkan. Wellek & Warren (1994) menyatakan bahwa sastra bukan hanya produk estetika, tetapi juga medium kritik sosial terhadap ideologi dan ketimpangan yang mewujud dalam masyarakat.

Berikut merupakan kutipan-kutipan yang mencerminkan diskriminasi simbolik yang tergambar dalam Novel *Namaku Alam*:

Data 1:

“Dibandingkan dengan keluarga Bude Ita dan Bulik Anggi, keluarga kami adalah keluarga yang paling sederhana. Dimata mereka, kami dianggap keluarga pecundang. Bukan soal kemampuan finansial belaka, tetapi lebih lagi karena untuk waktu yang lama, status perkawinan Ibu tak jelas karena bapak menghilang” (NA, 2023:32)

Kutipan ini menunjukkan bahwa diskriminasi yang dialami oleh keluarga Alam bukan hanya berasal dari faktor ekonomi, tetapi lebih dalam lagi menyentuh aspek identitas sosial dan sejarah keluarga. Keluarga Alam dipandang sebagai “keluarga pecundang” bukan semata karena kesederhanaan hidup mereka, tetapi karena absennya sosok ayah yang terkait dengan status politik sebagai eks-tapol. Hilangnya bapak yang diasosiasikan dengan stigma politik menyebabkan posisi sosial keluarga ini menurun dalam pandangan kerabatnya sendiri.

Menurut Goffman (2009) dalam teori stigma, ini merupakan bentuk stigma identitas sosial— yakni ketika atribut yang diasosiasikan dengan sejarah atau kelompok tertentu menyebabkan seseorang dianggap menyimpang dari norma sosial. Absennya ayah dan status perkawinan yang tidak jelas menjadi simbol ketidakwajaran, dan dalam konteks ini, ketidakwajaran itu dikonstruksi secara sosial sebagai akibat dari “dosa ideologis” yang diwariskan. Stigma ini bukan bersifat personal, tetapi struktural dan diwariskan, memperkuat

konstruksi diskriminatif terhadap keluarga eks-tapol.

Dalam kerangka memori kolektif Halbwachs & Coser (2020), kutipan ini menunjukkan bagaimana narasi keluarga Alam dibentuk oleh memori sosial yang dominan, mereka tidak hanya dikenang sebagai keluarga tanpa kepala rumah tangga, tetapi lebih jauh lagi sebagai keluarga yang membawa aib sejarah. Absennya ayah tidak hanya menjadi kehilangan pribadi, tetapi juga simbol sosial dari "ketidakwonsenan politik" dalam masyarakat pasca-1965 yang masih dikendalikan oleh narasi Orde Baru.

Secara sosiologis, seperti diteorikan Wellek dan Warren, serta Alan Swingewood, novel ini mencerminkan struktur sosial masyarakat pasca-Orde Baru yang masih menyimpan hierarki simbolik berdasarkan afiliasi sejarah politik. Sastra menjadi ruang kritik di mana marginalisasi seperti yang dialami tokoh Alam dan keluarganya dapat diangkat dan dibedah secara literer. Keluarga sederhana ini tidak sederhana dalam makna ekonomi semata, tetapi secara simbolik dijauhkan dari status sosial yang sah karena keberpihakan politik masa lalu. Novel *Namaku Alam* berfungsi sebagai "dokumen sosial" yang mengartikulasikan penyingkiran simbolik yang dialami oleh keluarga eks-tapol.

Data 2:

"Keluarga Sastrowidjojo yang rata-rata berhasil menjadi dokter atau mengawini dokter. Eyang Kakung Sastrowidjojo adalah salah satu tokoh Rumah Sakit CBZ yang kini dikenal sebagai RS Cipto Mangunkusumo. Bude Ratna Djuwita yang kami panggil Bude Ita adalah putri sulung, seorang dokter internis yang menikah dengan Pakde Yahya yang berpangkat Brigjen Angkatan Darat. Bulik Ratna Anggraeni atau Bulik Anggi, adik bungsu Ibu, seorang dokter pediatrik yang menikah dengan Paklik Handojo, seorang dokter ahli bedah terkemuka yang sangat jarang kelihatan di acara keluarga saking tangannya

dibutuhkan para pasien. Ibuku adalah putri tengah keluarga Sastrowidjojo yang sejak awal sudah tumbuh sebagai putri paling ayu dan dianggap paling aneh. Pertama, karena Ibu memilih belajar di Faculteit Sastra dan Filsafat Universiteit Indonesia, dan kedua karena Ibu memilih menikah dengan "seorang komunis." (NA, 2023:33)

Kutipan ini menggambarkan ketimpangan simbolik dalam keluarga besar Sastrowidjojo yang mendasarkan prestise keluarga pada status sosial-profesional dan ideologi. Pilihan sang ibu untuk menikah dengan seorang yang dianggap "komunis" menjadi titik stigmatisasi. Narasi ini memperlihatkan bagaimana identitas ideologis seseorang menjadi acuan bagi penghukuman simbolik dalam relasi kekeluargaan.

Dalam teori Goffman (2009), label "komunis" adalah stigma karakter yang telah dipolitisasi dan dilekatkan pada seluruh struktur sosial keluarga. Ibu Alam tidak hanya dianggap menyimpang karena pilihan pasangan, tetapi juga menggerus kehormatan simbolik keluarga. Hal ini memperlihatkan bagaimana sistem nilai Orde Baru berhasil menyusup ke ranah privat melalui stigma kolektif. Dalam perspektif memori kolektif Halbwachs & Coser (2020), keluarga besar Alam mewarisi ingatan sosial yang selaras dengan narasi resmi negara. Mereka mempertahankan jarak simbolik terhadap anggota keluarga yang dianggap berseberangan dengan sejarah dominan, menunjukkan bagaimana stigma diwariskan bukan hanya dari masyarakat, tetapi juga dari kelompok terkecil: keluarga.

Sastra berperan sebagai arena pembongkaran sistem nilai yang mapan, seperti dijelaskan oleh Swingewood. Dalam novel ini, pilihan ibu Alam menjadi aksi subversif terhadap tatanan keluarga borjuis-militeristik. Leila menyampaikan bagaimana diskriminasi simbolik bukan hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga dalam relasi paling intim, dan ini memperkuat fungsi kritik sastra sebagai alat pembongkar hegemoni budaya.

Data 3:

"Sebetulnya aku sudah terbiasa mendengar mereka membahas keluargaku yang dianggap aneh, yang tampil agak gila ditengah keluarga priyayi ini. Tapi kali ini mereka khusus membicarakan bapak, telingaku jadi mendadak terasa panas" (NA, 2023:38)

Narasi ini mempertegas posisi marginal tokoh utama di hadapan struktur nilai keluarga priyayi. Label "aneh" dan "gila" adalah konstruksi simbolik yang digunakan untuk menegaskan jarak antara yang dianggap normal dan yang dibebani sejarah kelam. Diskriminasi simbolik ini bersumber dari upaya mempertahankan identitas kelas melalui pengucilan simbolik terhadap yang menyimpang. Dalam kerangka stigma Goffman (2009), keluarga Alam mengalami stigma identitas sosial yang terwariskan. Cap "gila" bukan cerminan perilaku, melainkan bentuk diskualifikasi sosial atas dasar sejarah politik. Diskriminasi seperti ini berfungsi menjaga "kemurnian identitas sosial" keluarga yang dominan dan mendiskreditkan pihak yang dianggap mencorengnya.

Memori kolektif dominan dalam keluarga ini telah membentuk persepsi tunggal terhadap peristiwa sejarah. Dengan menganggap keluarga Alam sebagai penyimpang, mereka tidak hanya menolak alternatif memori sejarah, tetapi juga memperkuat satu narasi bahwa mereka adalah "korban" dari pilihan menyimpang saudara mereka. Sastra menjadi ruang di mana stigma semacam ini bisa dibalikkan menjadi kekuatan naratif. Novel *Namaku Alam* mengajak pembaca untuk memposisikan diri sebagai subjek yang menolak peran korban pasif dan mulai menggugat label-label diskriminatif melalui narasi personal yang sarat dengan emosi dan kesadaran historis.

Data 4:

"Segala sesuatu tampaknya harus selalu bermuara pada "siapa bokap lu, siapa nyokap lu." Mungkin karena itulah

Indonesia tak pernah dianggap serius oleh berbagai negara karena segala sesuatu jarang diselenggarakan berdasarkan merit. Dan bagi warga Indonesia seperti Bimo dan aku dan ribuan anakanak tapol lainnya, persoalan "siapa bokap lu" adalah pertanyaan yang akan selalu membuat kami gentar karena pasti akan berakhir dengan suasana yang tak nyaman." (NA, 2023:136)

Kutipan ini menegaskan bahwa identitas sosial dalam masyarakat Indonesia tidak dibangun atas dasar kemampuan atau prestasi, tetapi ditentukan oleh asal-usul. Sistem ini melestarikan diskriminasi simbolik yang membayangi generasi baru eks-tapol. Ketika silsilah menjadi ukuran kehormatan, maka sejarah politik menjadi penjara simbolik bagi tokoh-tokoh seperti Alam. Dalam kerangka teori stigma Goffman (2009), struktur sosial seperti ini mendorong anak-anak eks-tapol untuk terus berada dalam posisi defensif karena mereka sudah diasumsikan membawa warisan menyimpang. Nama keluarga bukan hanya identitas, tetapi juga alat stigmatisasi yang melekat dan sulit dinegosiasikan.

Memori kolektif berperan besar dalam membentuk kondisi ini. Narasi dominan yang menyalahkan keturunan eks-Tapol membuat masyarakat memperlakukan mereka bukan sebagai individu merdeka, tetapi sebagai pewaris beban sejarah yang belum selesai. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya jejak ideologis Orde Baru dalam memori sosial bangsa. Dalam konteks sosiologi sastra, *Namaku Alam* tidak hanya menarasikan pengalaman personal, tetapi juga merepresentasikan kegagalan negara dan masyarakat dalam merekonstruksi ulang relasi sosial yang adil. Tokoh Alam menjadi saksi hidup atas bagaimana struktur simbolik memperpanjang luka sejarah melalui caracara sosial yang tampak alami namun sesungguhnya penuh kekerasan simbolik

B. Diskriminasi Struktural

Diskriminasi struktural dalam novel ini tampak dalam relasi kekuasaan antar anak-anak

dan keluarga besar yang mengandalkan status politik ayah mereka. Trimulya, Denny, dan Alam mengalami subordinasi bukan karena perilaku personal, melainkan karena posisi sosial mereka dalam struktur yang sudah dibentuk secara historis dan sistemik.

Goffman (2009) menjelaskan diskriminasi ini merupakan bentuk *courtesy stigma* atau stigma warisan—di mana individu diperlakukan tidak adil karena hubungan sosial atau keturunan dari seseorang yang distigmatisasi. Anak-anak eks-tapol mewarisi stigma tersebut tanpa pilihan. Struktur sosial memperkuat posisi dominan pihak yang berasal dari keluarga militer atau elit ekonomi. Halbwachs & Coser (2020) menegaskan bahwa memori kolektif tentang siapa yang “berjasa” dan siapa yang “berbahaya” diwariskan dalam narasi sosial yang tidak tampak tetapi bekerja dalam relasi sosial. Irwan misalnya, menampilkan superioritasnya karena identitas ayahnya sebagai militer, mencerminkan nilai sosial yang melekat kuat dalam kesadaran kolektif.

Wellek & Warren (1994), mengatakan kalau tokoh tidak hidup di ruang hampa. Alam, Trimulya, dan Denny adalah representasi dari subjek yang dikonstruksi dan direproduksi melalui struktur kekuasaan simbolik yang membentuk jalan hidup mereka. Novel ini membuka ruang bagi pembaca untuk memahami kompleksitas subordinasi struktural yang bekerja bahkan dalam relasi anak-anak.

Berikut merupakan kutipan-kutipan yang mencerminkan diskriminasi struktural yang tergambar dalam Novel *Namaku Alam*:

Data 1:

“Beberapa kali para sepupuku memperlakukan aku seperti robot pengingat. Mereka sering mengadakan permainan Cepat Tepat antar-keluarga besar Sastrowidjojo karena merasa asyik setiap kali aku bisa menjawab pertanyaan apa pun tanpa berpikir. Tetapi karena siapa pun yang melawan kelompokku pasti kalah, akhirnya permainan itu berubah menjadi acara Cepat Tepat bersama Alam.” (NA, 2023:34)

Penggalan ini memperlihatkan bentuk diskriminasi struktural yang beroperasi secara

halus dalam relasi sosial keluarga. Meskipun keistimewaan ingatan Alam diakui, ia tidak diperlakukan secara setara sebagai individu. Ia dikonstruksikan bukan sebagai subjek yang dihargai, tetapi sebagai objek hiburan yang fungsional. “Robot pengingat” adalah metafora dehumanisasi yang memperlihatkan bagaimana struktur sosial internal keluarga besar mereproduksi ketimpangan berdasarkan narasi dominan—Alam tidak diposisikan sebagai bagian dari sistem nilai keluarga, melainkan sebagai pengecualian yang dimanfaatkan.

Jika menggunakan perspektif Goffman (2009), perlakuan ini adalah bentuk “penyimpangan identitas sosial” yang ditoleransi dalam batas tertentu tetapi tidak sepenuhnya diterima. Alam distigmatisasi tidak melalui kata-kata langsung, tetapi melalui perlakuan yang menunjukkan batas sosial antara dirinya dan keluarga besar. Permainan yang awalnya kompetitif berubah menjadi perayaan keanehan Alam, mempertegas bahwa ia bukan anggota “normal” dari sistem tersebut, melainkan simbol luar biasa yang dikurung dalam struktur sosial yang tak adil.

Menurut kerangka memori kolektif Halbwachs & Coser (2020), struktur sosial yang membingkai Alam sebagai “pengingat” juga berkaitan dengan posisi keluarganya sebagai penjaga narasi sejarah alternatif. Keluarga besarnya yang berada di jalur resmi sejarah Orde Baru berusaha melupakan peristiwa yang menyangkut eks-tapol, sedangkan Alam justru mengingat segalanya. Ingatan itu menjadi ancaman terhadap narasi dominan dan membuatnya semakin dikucilkan dalam struktur keluarga sebagai pengingat dari sesuatu yang ingin dilupakan oleh banyak orang.

Kutipan ini menunjukkan bahwa struktur kekuasaan dalam keluarga adalah representasi mikro dari relasi sosial yang lebih luas. Leila S. Chudori tidak hanya menghadirkan pertentangan individu dengan institusi, tetapi juga memetakan bagaimana kekuasaan bekerja melalui struktur sosial kecil seperti keluarga. Novel ini memperlihatkan bagaimana subordinasi dapat dibungkus dalam permainan dan keakraban, padahal pada hakikatnya adalah strategi pembungkaman simbolik yang dibentuk oleh struktur sosial ideologis.

Data 2:

“Pada masa SMP tinggiku hampir menjulang hingga 168 cm, sedangkan Irwan tingginya sekitar 155 cm. Selain itu, para sepupu dan sanak juga mafhum, Irwan lebih angkuh dan dominan entah karena merasa bapaknya berbaju hijau yang “melindungi keluargamu karena bapakmu yang brengsek itu menghilang entah ke mana” atau mungkin karena mereka keluarga paling kaya raya yang mempunyai rumah di Jalan Martimbang, Kebayoran Baru, dengan halaman belakang luas dan kolam renang.” (NA, 2023:35)

Kutipan ini menampilkan hierarki sosial dalam skala mikro, di mana identitas seseorang ditentukan bukan oleh kapasitas personal (tinggi badan, kemampuan intelektual), tetapi oleh posisi politik keluarganya. Irwan merasa lebih unggul karena ayahnya merupakan bagian dari militer, institusi yang secara historis dianggap berjasa menyelamatkan bangsa pasca-1965. Sementara itu, keluarga Alam dianggap sebagai beban sejarah, pewaris dari “pengkhianatan” yang membuat mereka layak dipandang rendah oleh anggota keluarga lain.

Menurut teori stigma Goffman (2009), ini adalah bentuk peneguhan status sosial melalui struktur simbolik. Irwan merasa memiliki kuasa secara struktural karena menyandang nama dan warisan simbolik dari militer, sedangkan Alam mewarisi stigma dari ayahnya yang hilang pasca peristiwa 1965. Stigma ini tidak dibentuk secara individu, tetapi dijaga dan diperkuat oleh struktur sosial yang memberikan legitimasi kepada narasi resmi sejarah. Bahkan dalam dinamika anak-anak sekalipun, kekuasaan simbolik itu tetap berfungsi dan mereproduksi ketimpangan sosial.

Melalui lensa memori kolektif Halbwachs & Coser (2020), Irwan adalah representasi dari generasi yang mewarisi narasi dominan tanpa mengkritisinya. Ia menyerap nilai-nilai penghukuman terhadap keluarga eks-Tapol yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi dengan yakin memosisikan dirinya sebagai “pelindung” dari pihak yang dianggap membahayakan. Sementara itu, Alam terjebak dalam struktur memori kolektif yang menempatkannya sebagai warisan sejarah yang

tidak pernah ia pilih, tetapi harus ia tanggung seumur hidup.

Sastra dalam hal ini menjadi arena untuk membongkar struktur kekuasaan yang telah menjadi normal dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dalam novel *Namaku Alam*, relasi kekuasaan yang dibangun dalam keluarga besar tidak hanya menjadi pengingat akan ketidakadilan sejarah, tetapi juga menunjukkan betapa ideologi dominan merasuk ke dalam relasi sosial paling intim. Melalui tokoh Irwan dan Alam, Leila membongkar bangunan kuasa struktural yang tidak hanya bekerja di negara, tetapi juga dalam keluarga.

Data 3:

“Dari gelagatnya, aku sudah bisa menebak dia pasti anak yang selalu diperintah kesana kemari oleh Irwan. Berwajah polos, berkulit agak gelap, dan dia bertanya dengan ragudan agak takut sembari sesekali menengok kearah Irwan yang berdiri jauh darinya.” (NA, 2023:73)

Kutipan ini menunjukkan bagaimana diskriminasi struktural berjalan dalam relasi sosial anak-anak, yang dipengaruhi oleh latar belakang dan status simbolik keluarga. Anak yang digambarkan di sini tampak tidak memiliki otonomi dalam bersikap, karena telah terbiasa tunduk pada dominasi Irwan. Relasi subordinatif ini terbentuk bukan dari pilihan pribadi, melainkan dari tekanan sistemik yang membuatnya selalu menyesuaikan diri dengan kekuasaan simbolik anak militer.

Merujuk pada teori stigma Goffman (2009), anak ini tampaknya menyandang “stigma peran sosial subordinat” yang diasosiasikan dengan status kelas dan garis keturunan. Ketakutan dan keraguan yang ditampilkannya adalah refleksi dari tekanan sosial yang berlapis, ia tahu posisinya rendah dan telah menginternalisasi pola interaksi yang menempatkan dirinya sebagai pihak yang harus selalu patuh, tak berdaya untuk melawan.

Jika ditarik ke ranah memori kolektif, situasi ini memperlihatkan bagaimana narasi kekuasaan masa lalu diwariskan tidak hanya dalam institusi formal, tetapi juga dalam cara anak-anak mempersepsikan posisi mereka dalam kelompok sosial. Ingatan kolektif keluarga tentang siapa yang memiliki kekuasaan dan siapa yang tidak, dibentuk sejak dini melalui relasi

antarindividu yang bersandar pada status simbolik keluarga. Anak ini telah mewarisi rasa takut dan kepasrahan terhadap struktur yang sudah mapan.

Leila dalam novel *Namaku Alam* tidak hanya mengangkat ketimpangan politik, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sistem tersebut membentuk identitas anak-anak dalam masyarakat pasca-1965. Sastra menjadi medium untuk mengekspos cara-cara kekuasaan bekerja di luar ruang negara, dalam mikrostruktur sosial seperti hubungan anak-anak sekolah. Ketaatan dan ketundukan tokoh ini mencerminkan kuatnya dominasi ideologis yang telah melembaga dalam tatanan sosial, bahkan dalam relasi antarteman.

Data 4:

“Maka geng Denny memperlakukan Trimulya sebagai andalan pusat percontekan sekaligus menjadi hamba sahaya yang paling mudah disuruh-suruh dan dibentak-bentak. Apalagi Trimulya bertubuh tinggi dan agak kurus, berwajah putih pucat dibandingkan Denny dan kawan-kawannya yang bertubuh tinggi dan besar, maka trimulya seperti tak punya pilihan selain mematuhi perintah Denny dan kawankawannya.”
(NA, 2023:127-128)

Trimulya adalah simbol dari individu yang secara fisik dan sosial dianggap inferior dalam tatanan kelompok. Tubuhnya yang “kurus dan pucat” menjadi dasar diskriminasi yang kemudian dilegitimasi oleh relasi sosial di sekolah. Ia ditempatkan sebagai pelayan dalam struktur informal kelompok Denny, menunjukkan bagaimana kekuasaan bukan hanya dijalankan melalui jabatan formal, tetapi juga melalui kapital sosial dan kekuatan fisik yang didukung oleh status keluarga.

Menurut Goffman (2009), stigma fisik dan sosial dapat berinteraksi dalam memperkuat marginalisasi. Trimulya mengalami diskriminasi berlapis karena tidak sesuai dengan prototipe sosial dominan (kuat, percaya diri, anak orang penting). Struktur sosial sekolah membiarkan perlakuan ini terus berlangsung karena status Denny sebagai anak pengusaha berpengaruh memungkinkan dominasi berlangsung tanpa koreksi moral maupun struktural.

Merujuk perspektif memori kolektif, anak seperti Trimulya tidak memiliki tempat dalam struktur narasi dominan yang memuliakan kekuatan, keberanian, dan asal-usul keluarga. Ia dibentuk dalam ruang sosial yang mengabaikan nilai setara antarindividu. Ia tidak hanya dikucilkan, tetapi juga dibentuk oleh ingatan kolektif yang sudah menempatkannya dalam posisi inferior sejak awal.

Leila memperlihatkan bahwa struktur sosial yang terbentuk di sekolah mencerminkan miniatur masyarakat. Penindasan yang dialami Trimulya menunjukkan bahwa diskriminasi struktural terhadap individu tidak selalu terlihat kasat mata, tetapi hadir dalam pola relasi harian yang tidak dipersoalkan karena telah menjadi bagian dari sistem sosial yang mapan. Novel ini menyoroti bagaimana struktur sosial terus memproduksi subordinasi melalui tubuh, status, dan kelas sosial sejak masa remaja.

Data 5:

“Denny memaksa Tri untuk memberanikan diri mengutil lighter merek Zippo yang selalu menjadi pegangan semua lelaki Jakarta, baik yang anak-anak SMA yang baru belajar merokok maupun bapakbapak berperut tambun.” (NA, 2023:135)

Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana dominasi sosial menjelma dalam tekanan psikologis yang dilanggengkan oleh struktur relasi tidak setara. Trimulya yang sebelumnya dijadikan ‘budak intelektual’ kini dijebak untuk melakukan tindak kriminal demi kepuasan simbolik kelompok dominan. Tindakan mengutil bukan semata tindakan pribadi, tetapi produk dari tekanan struktural yang membentuk Trimulya sebagai pihak yang tidak punya kuasa menolak.

Menurut kacamata teori stigma Goffman (2009), Trimulya berada dalam posisi rentan karena cap sosialnya sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya. Stigma ini tidak berasal dari satu atribut saja, tetapi dari akumulasi peran sosial yang telah dilekatkan padanya sejak awal oleh lingkungan. Ia menjadi simbol subordinasi total, di mana dirinya tidak lagi dilihat sebagai manusia bebas, tetapi sebagai alat untuk mengeksekusi kehendak sosial kelompok yang lebih kuat.

Konsep memori kolektif memperjelas bahwa relasi seperti ini tidak terbangun dalam

ruang hampa. Struktur sosial sekolah sudah dibentuk oleh narasi historis yang memuja kekuasaan, koneksi, dan keberanian maskulin. Trimulya hanyalah aktor kecil dalam struktur sosial yang lebih luas, yang mereproduksi kekuasaan berdasarkan warisan identitas keluarga dan kekuatan sosial ekonomi yang diwariskan antargenerasi. Sastra berperan penting dalam mengangkat praktik kekuasaan informal ini ke permukaan.

Leila menunjukkan bahwa penindasan terhadap anak-anak eks-tapol atau pihak minoritas bukan hanya melalui kekerasan negara, tetapi juga melalui pemaksaan dalam struktur pergaulan remaja yang mengadopsi struktur sosial dominan. Novel *Namaku Alam* membuka ruang kritik terhadap sistem sosial yang terus melestarikan subordinasi dan ketakutan dalam bentuk yang disamarkan sebagai “kebersamaan” atau “permainan.”

C. Diskriminasi Institutional

Diskriminasi institusional sangat kentara dalam interaksi antara tokoh dengan lembaga seperti sekolah dan aparat negara. Kepala sekolah yang menyebut Alam sebagai “anak komunis” dan aparat yang menginterogasi ibunya adalah bentuk nyata dari bagaimana lembaga formal ikut melanggengkan ketidakadilan sosial.

Menurut Goffman (2009), lembaga sosial memiliki peran besar dalam menciptakan dan melegitimasi stigma. Ketika sekolah sebagai institusi pendidikan justru menolak membela anak korban kekerasan dan malah melabelinya secara ideologis, berarti sistem institusional sudah dibajak oleh logika diskriminatif. Stigma tidak hanya dilekatkan oleh individu, tetapi dikokohkan melalui praktik resmi lembaga. Halbwachs & Coser (2020) menggarisbawahi peran institusi negara dan pendidikan dalam mengatur memori kolektif. Dalam novel ini, kepala sekolah dan aparat mewakili lembaga yang mereproduksi narasi tunggal milik negara. Mereka menjadi alat represi simbolik yang memaksa keluarga eks-Tapol tunduk atau disingkirkan.

Sosiologi sastra memandang bahwa sastra dapat menjadi arena pengungkapan realitas lembaga yang selama ini dianggap netral, tetapi sesungguhnya bekerja menekan kelompok tertentu. *Namaku Alam* membongkar

bias ideologis yang hidup dalam sistem pendidikan dan penegakan hukum pasca-1965, memperlihatkan bahwa diskriminasi tidak hanya datang dari publik, tetapi juga dilembagakan secara formal.

Berikut merupakan kutipan-kutipan yang mencerminkan diskriminasi institutional yang tergambar dalam novel *Namaku Alam*:

Data 1:

“Beberapa hari setelah peristiwa itu, aku hanya mendengar ayah Denny sudah dipanggil ke sekolah, tetapi Denny tak memperoleh hukuman apa pun. Aku sungguh tak paham apa yang tengah terjadi. Mungkin karena ayah Trimulya adalah salah satu wakil direktur di perusahaan holding Perdana Group milik Arya Perdana (ayah Denny) maka mereka ‘menyelesaikan secara kekeluargaan’?”
(NA, 2023:130– 131)

Kutipan ini dengan jelas memperlihatkan wujud diskriminasi institusional, yakni ketidakadilan yang terjadi dalam sistem formal seperti sekolah karena pengaruh kuasa politik atau ekonomi. Ketika Denny tidak dihukum atas perbuatannya, padahal telah melanggar norma sekolah, ini menandakan bahwa institusi pendidikan tunduk pada relasi kuasa eksternal. Keputusan “diselesaikan secara kekeluargaan” adalah representasi dari institusi yang tidak netral, melainkan bias terhadap kekuasaan modal.

Menilik kerangka stigma Goffman (2009), Trimulya adalah representasi dari siswa dengan posisi sosial yang tidak cukup kuat untuk menuntut keadilan. Sebaliknya, Denny adalah bagian dari kelas dominan yang dapat menghindari konsekuensi atas perbuatannya. Stigma terhadap Trimulya sebagai “anak bawahan” dilekatkan bukan karena kesalahan, tetapi karena posisi sosial keluarganya yang tidak sebanding dengan elite ekonomi, sehingga ia tidak mendapat pembelaan institusional.

Menurut Halbwachs & Coser (2020), memori kolektif dibentuk dalam institusi-institusi seperti sekolah, yang seharusnya menjadi ruang netral untuk pendidikan dan keadilan. Namun dalam novel ini, memori sekolah justru menjadi tempat di mana ketidakadilan dilembagakan. Kejadian ini menunjukkan bagaimana institusi pendidikan juga menjadi pelestari narasi kelas sosial yang bias, dan bagaimana pengalaman

seperti ini terus hidup dalam ingatan kolektif anak-anak dari kelas bawah atau yang distigmatisasi sejarah keluarganya.

Melalui lensa sosiologi sastra, novel *Namaku Alam* membongkar mitos netralitas institusi melalui narasi personal. Sekolah sebagai lembaga formal seharusnya memperjuangkan keadilan dan perlindungan, tetapi malah tunduk pada kekuasaan ekonomi. Sastra menjadi alat penting untuk mengkritik bagaimana kekuasaan struktural menyusup ke dalam ruang-ruang yang dianggap objektif, dan menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap tokoh-tokoh seperti Trimulya bukan hanya akibat tindakan personal, tetapi dilegitimasi oleh sistem institusional yang korup.

Data 2:

"Aku ingat segalanya. Aku ingat bagaimana Pak Kepala Sekolah menggerutu "dasar anak komunis, ya, kelakuannya tak ada aturan", sementara aku mendengar Ibu Sarmi dan Pak Kimia Handoko yang galak tapi baik hati itu menekankan bagaimana Denny dan para hambanya sudah lama menjadi serombongan preman yang kerjanya menindas kawan-kawan sekelas dan adik kelas. Pak Kepala Sekolah dan Pak BP tampak pura-pura tuli dan tak mengindahkan pembelaan Ibu Sarmi dan Pak Kimia. Pak Wali Kelas mungkin berada di zona netral karena dia hanya duduk di hadapan kami dan memastikan Bimo yang tampak babak belur perlu ke klinik segera. Ketika Pak Wali Kelas membimbing Bimo ke klinik, aku berdiri ingin ikut, namun Pak Kepala Sekolah membentak agar aku duduk." (2023:149)

Kutipan ini memperlihatkan praktik diskriminasi institusional yang secara eksplisit dilakukan oleh otoritas sekolah terhadap anak eks-tapol. Kepala Sekolah secara verbal menyatakan bahwa Alam adalah "anak komunis" yang "tak punya aturan," padahal secara hukum dan moral label tersebut tidak berdasar. Ucapan ini bukan sekadar opini personal, tetapi datang dari pejabat institusi pendidikan, sehingga memiliki kekuatan normatif yang menjustifikasi diskriminasi terhadap Alam.

Menurut Goffman (2009), stigma seperti

ini bukan hanya mendiskreditkan tokoh secara personal, tetapi juga berperan dalam menyingkirkan individu dari penerimaan sosial yang sah. Kepala sekolah, melalui komentarnya, bukan hanya mempermalukan Alam, tetapi juga melegitimasi perlakuan tidak adil dari sistem terhadapnya. Ini adalah bentuk konkret dari stigmatisasi struktural, di mana lembaga formal menjadi agen diskriminasi terhadap pihak yang dianggap "bermasalah secara ideologis".

Menilik kerangka memori kolektif Halbwachs & Coser (2020), ucapan kepala sekolah mencerminkan betapa kuatnya narasi Orde Baru masih hidup dan diwariskan melalui institusi pendidikan. Kepala sekolah menjadi perpanjangan tangan dari wacana negara yang mendiskreditkan keluarga eks-Tapol. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai ideologis tertentu yang dapat merugikan kelompok tertentu.

Leila S. Chudori melalui novel ini menghadirkan realitas yang jarang disentuh dalam narasi pendidikan: bahwa sekolah dapat menjadi alat represi kultural yang menyamarkan diskriminasi sebagai penegakan disiplin. Sastra di sini menjadi ruang artikulasi bagi mereka yang tidak mendapat keadilan dalam sistem formal. Novel ini mengajak pembaca untuk mempertanyakan kembali netralitas institusi dan keberpihakannya terhadap sejarah resmi yang penuh bias politik.

Data 3:

"Selama Bapak menghilang dari tahun 1965 sampai 1968, kamilah yang menjadi sasaran interogasi. Hampir setiap pekan, rumah kami disatroni dan diobrak-abrik aparat yang bertanya lokasi Bapak. Mereka bukan bertanya tetapi membentak-bentak Ibu dengan suara menggelegar." (NA, 2023:154)

Peristiwa ini mencerminkan bentuk paling brutal dari diskriminasi institusional, yaitu teror negara melalui aparatnya. Interogasi yang dilakukan secara rutin dan penuh intimidasi bukanlah proses hukum yang sah, melainkan upaya sistematis untuk menekan keluarga dari eks-Tapol. Ibu Alam menjadi korban utama dari proses ini, meskipun ia tidak melakukan pelanggaran hukum apa pun. Aparat beroperasi atas dasar kuasa ideologis, bukan prosedur legal.

Goffman (2009) menyebut bahwa stigma menjadi lebih berbahaya ketika dilembagakan. Dalam hal ini, aparat negara bukan hanya memperlakukan keluarga Alam sebagai tersangka, tetapi juga memperkuat stigma sosial melalui kekerasan verbal dan ancaman. Perilaku aparat tersebut menjadikan stigma terhadap eks-Tapol bukan sekadar wacana, tetapi pengalaman nyata yang membekas secara psikis dan sosial. Diskriminasi ini beroperasi melalui institusi yang seharusnya melindungi warga negara, tetapi justru menjadi alat represi.

Memori kolektif yang terbentuk dari peristiwa ini adalah memori trauma. Generasi berikutnya tumbuh dalam bayang-bayang ketakutan terhadap negara. Rumah yang seharusnya menjadi ruang aman justru menjadi arena kekuasaan represif. Pengalaman ini tidak hanya membentuk persepsi Alam terhadap dunia, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah diam yang tidak pernah diakui dalam narasi nasional. Halbwachs menekankan bahwa ingatan kolektif kelompok tertindas seperti ini seringkali ditekan oleh memori resmi negara.

Melalui sastra, Leila menuliskan ulang sejarah dari sudut pandang korban. Novel ini bukan hanya menyajikan realitas masa lalu, tetapi juga membuka ruang bagi rekonstruksi ingatan sosial. Apa yang tidak bisa dikatakan dalam dokumen sejarah resmi, bisa disuarakan melalui fiksi. Dengan cara ini, *Namaku Alam* menjadi bukti literer bahwa diskriminasi institusional telah mengakar dalam sistem negara dan menciptakan luka antargenerasi yang terus berlangsung hingga kini.

D. Diskriminasi Kultural

Diskriminasi kultural dalam novel ini tampak pada kekerasan yang dianggap wajar dalam rumah tangga, stigma terhadap anak tiri, serta penerimaan sosial terhadap dominasi dalam hubungan anak-anak dan orang dewasa. Budaya diam dan penerimaan terhadap kekerasan adalah bagian dari pola dominasi yang diturunkan secara sosial.

Goffman (2009) menunjukkan bahwa stigma juga dapat hidup dan diterima sebagai sesuatu yang ‘biasa’ dalam konteks budaya tertentu. Ketika kekerasan verbal atau fisik dianggap sebagai “cara mendidik,” maka itu menandakan adanya kekuasaan budaya yang mendukung perlakuan diskriminatif.

Halbwachs & Coser (2020) menjelaskan bahwa memori kolektif bukan hanya tentang sejarah besar, tetapi juga tentang kebiasaan, bahasa, dan nilai-nilai yang diwariskan. Novel ini memperlihatkan bagaimana ketakutan dan kepatuhan yang diwariskan kepada Alam dan Bimo telah menjadi bagian dari ingatan budaya keluarga eks-tapol yang tak pernah benar-benar pulih dari represi.

Wellek & Warren (1994) menekankan bahwa sastra adalah alat untuk membongkar nilai-nilai dominan yang menyamar sebagai “kebudayaan”. Novel ini secara halus menggugat budaya patriarki, tradisi kekerasan dalam pendidikan keluarga, dan nilai-nilai sosial yang membungkam anak-anak. Dengan mengangkat trauma yang disamarkan sebagai didikan, *Namaku Alam* menjadi kritik terhadap nilai-nilai budaya yang merusak namun dilestarikan.

Berikut merupakan kutipan-kutipan yang mencerminkan diskriminasi kultural yang tergambar dalam novel *Namaku Alam*:

Data 1:

“Musuh Bimo adalah ayah tirinya sendiri! Bimo mengatakan bahwa siksaan dari Pak Prakosa adalah ritual sehari-hari yang dihadapinya, terutama jika Ibunya tak di rumah. Mendengar babak demi babak bagaimana Pak Prakosa menyundutnya setiap kali dia tak puas dengan jawaban Bimo atas pertanyaannya.” (NA, 2023:105)

Kekerasan yang dialami Bimo dalam rumah tangga adalah bentuk diskriminasi kultural yang dilembagakan dalam praktik kekuasaan maskulin domestik. Kekerasan fisik dalam keluarga bukan hanya tindakan individual, tetapi bagian dari warisan budaya patriarkal yang mengakar, di mana laki-laki dewasa merasa memiliki legitimasi untuk mendisiplinkan anak dengan cara kekerasan. Ini bukan semata kekerasan domestik, tetapi bentuk representasi kekuasaan budaya yang menempatkan anak sebagai subjek yang bisa diobjekkan.

Menurut Goffman (2009), kekerasan berulang yang dilakukan oleh ayah tiri memperlihatkan bagaimana stigma terhadap anak tiri dapat memicu perlakuan diskriminatif yang dilegitimasi oleh budaya diam. Bimo, dalam hal ini, tidak hanya menjadi korban kekerasan, tetapi juga objek yang tidak dianggap berhak membela

diri karena posisinya tidak diakui secara utuh dalam struktur keluarga. Stigma sebagai “anak lain” dalam konteks keluarga patriarkal membuatnya tidak memiliki posisi tawar.

Dalam kerangka memori kolektif, pengalaman ini menunjukkan bagaimana kekerasan dalam keluarga sering diwariskan sebagai bentuk “normalitas”. Budaya diam di sekeliling Bimo memperkuat keyakinan bahwa siksaan adalah bagian dari didikan, bukan penindasan. Hal ini mencerminkan warisan kolektif yang keliru tentang otoritas ayah dan anak sebagai pihak subordinat yang harus menerima kekerasan sebagai kewajiban.

Sastra dalam *Namaku Alam* memainkan peran penting dalam mengangkat bentuk kekerasan yang tak terlihat ini. Leila memperlihatkan bahwa diskriminasi kultural terhadap anak bukan hanya terjadi di ruang publik atau sekolah, tetapi juga di dalam rumah yang seharusnya menjadi tempat aman. Dengan menyuarakan pengalaman Bimo, novel ini menjadi perlawanan terhadap normalisasi kekerasan domestik dalam budaya patriarkal yang masih langgeng dalam masyarakat Indonesia.

Data 2:

“Aku berjalan melalui lorong perlahan dan tiba-tiba saja bulu tanganku berdiri tegak mendengar suara bentakan-bentakan dengan suara garang dari balik pintu salah satu kamar. Aku melangkah lagi dan terdengar suara seorang laki-laki menjerit setiap kali ada bunyi seperti cambuk atau tongkat. Aku tak sadar ketika aku berjalan dengan tubuh gemetar dan air mata berlinang-linang membasahi pipi karena aku tak tahu apakah ibuku tengah disiksa seperti orang-orang ini ataukah dia sekadar dihujani pertanyaan dan bentakan seperti saat para lelaki itu menggerebek rumah kami.” (NA, 2023:162)

Kutipan ini merepresentasikan teror kultural yang diwariskan dari praktik represi politik ke dalam tubuh masyarakat. Bukan hanya melalui kekuasaan negara secara formal, tetapi melalui atmosfer ketakutan dan kekerasan yang menjadi bagian dari kebudayaan represif. Suara bentakan dan cambukan tidak hanya

menyampaikan kekerasan fisik, tetapi juga menciptakan trauma psikis yang dalam dan berkelanjutan. Ini adalah wujud kekerasan kultural yang membekas dalam memori kolektif dan menembus batas-batas ruang pribadi.

Dalam teori stigma Goffman (2009), teror semacam ini membentuk citra diri seseorang sebagai korban yang terus-menerus merasa bersalah atau takut tanpa alasan yang jelas. Kenanga tidak tahu apakah ibunya sedang disiksa, tetapi ketakutan itu muncul karena pengalaman-pengalaman masa lalu dan suasana kultural yang mengandung kekerasan simbolik dan struktural. Ia telah menginternalisasi bahwa dirinya dan keluarganya adalah pihak yang layak ditekan.

Memori kolektif berperan penting di sini. Lorong-lorong gelap dan suara-suara keras bukan hanya memunculkan ketakutan saat itu, tetapi mengaktifkan kembali ingatan kolektif tentang represi dan interogasi yang telah menjadi bagian dari sejarah hidup keluarga eks-tapol. Bahkan ketika kekerasan tidak terjadi langsung, atmosfer dan simbolnya cukup untuk mengaktifkan trauma yang telah terbangun sejak masa kanak-kanak.

Sastra menjadi medium yang sangat efektif untuk menggambarkan bentuk kekerasan kultural yang tidak tertulis dalam sejarah resmi. Leila menghidupkan kembali suasana represif yang masih hidup dalam ingatan bawah sadar generasi pasca-1965. Novel ini bukan hanya mengisahkan peristiwa traumatis, tetapi juga merekonstruksi kondisi sosial-budaya yang membiarkan kekerasan menjadi bagian dari pengalaman hidup yang “biasa.” Dengan demikian, *Namaku Alam* menjadi semacam dokumen perlawanan kultural terhadap warisan kekerasan Orde Baru.

Data 3:

“Hampir setiap tiga atau empat hari, Om Bersuara Keras menghampiriku, yang berarti aku harus membersihkan ruang neraka, begitulah aku menyebutnya. Aku sudah mulai terbiasa dengan tugas itu dan sudah berhenti menangis.” (NA, 2023:168)

Kutipan ini memperlihatkan bagaimana kekerasan kultural hadir dalam bentuk represi fisik dan psikis yang berulang. Istilah “ruang neraka” dan kebiasaan membersihkan ruang tersebut di bawah perintah Om Bersuara Keras menggambarkan pola pengendalian sosial yang

mengakar. Ini adalah contoh kekuasaan yang bekerja melalui pembiasaan, di mana korban (Kenanga) secara perlahan tidak lagi menangis atau melawan, melainkan menerima situasi sebagai keniscayaan hidup.

Dalam kacamata Goffman (2009), ini adalah bentuk stigma internal yang telah diinternalisasi oleh korban. Ketika seseorang mulai menerima peran subordinat sebagai sesuatu yang wajar dan berhenti menunjukkan resistensi emosional, maka struktur kekuasaan telah berhasil mengontrol aspek paling pribadi dari individu: perasaan. Alam tidak hanya distigmatisasi dari luar, tetapi mulai hidup dalam stigma itu, sebagai “anak tapol” yang pantas diperlakukan kasar atau dibebani tugas tanpa alasan.

Konsep memori kolektif dalam kutipan ini sangat kuat. Setiap tindakan yang berulang menjadi bagian dari memori tubuh. Penerimaan terhadap perlakuan tidak adil mencerminkan bagaimana trauma sosial diwariskan dalam bentuk budaya disiplin yang keras. Ini bukan hanya pengalaman personal, tetapi bagian dari memori kolektif anak-anak dari keluarga eks-Tapol yang dibentuk untuk patuh dan tidak banyak bertanya.

Leila menghadirkan *Namaku Alam* sebagai ruang estetika yang menyuarakan kekerasan yang berlangsung diam-diam. Novel ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan tidak hanya berlangsung di panggung politik, tetapi juga dalam praktik sosial yang paling sehari-hari: perintah membersihkan, suara keras, dan hilangnya hak untuk berkata tidak. Sastra berperan penting dalam merekam bentuk kekerasan kultural seperti ini, yang sering tidak masuk dalam laporan sejarah, tetapi justru menjadi luka paling dalam dalam kehidupan korban.

SIMPULAN

Novel *Namaku Alam* karya Leila S. Chudori menampilkan secara intens pengalaman diskriminatif yang dialami oleh keluarga eks-Tapol melalui berbagai bentuk sosial yang saling terkait. Berdasarkan analisis yang dilakukan, diskriminasi sosial dalam novel ini tidak berdiri sendiri, melainkan bersifat multidimensi. Diskriminasi simbolik hadir melalui pelabelan negatif, stereotip, dan

pengucilan sosial akibat status keluarga yang dianggap “bermasalah” secara ideologis. Diskriminasi struktural muncul dalam bentuk ketimpangan relasi kuasa antara individu berdasarkan latar belakang keluarga, terutama dalam ranah sekolah dan hubungan antartokoh. Diskriminasi institusional terlihat dari bagaimana lembaga pendidikan dan aparat negara melanggengkan stigma dan memperlakukan keluarga eks-Tapol secara tidak adil, sementara diskriminasi kultural mengungkap bagaimana kekerasan, baik fisik maupun simbolik, telah dinormalisasi dalam budaya patriarkal dan praktik sosial harian.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya pendekatan teori stigma (Goffman), memori kolektif (Halbwachs), dan sosiologi sastra (Wellek & Warren) untuk memahami bagaimana trauma sosial ditransmisikan melalui narasi, simbol, dan bahasa. Sastra, dalam konteks ini, bukan sekadar medium hiburan atau dokumentasi, tetapi menjadi instrumen kultural untuk menggugat narasi sejarah dominan dan membuka ruang bagi kesadaran kolektif akan pentingnya rekonsiliasi. *Namaku Alam* bukan hanya kisah personal seorang anak korban, tetapi juga cermin dari realitas masyarakat Indonesia yang masih dibayangi sisa-sisa otoritarianisme, bahkan di masa pascareformasi. Dengan demikian, novel ini layak dibaca sebagai refleksi sejarah, wacana perlawanan, sekaligus ajakan untuk membangun kembali keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aleida, Martin. (2019). *Kata-kata membasuh luka*. Penerbit Buku Kompas.
- Arif, S. (2023, December 10). *Epigram Burung Nasar: Bayangan Maut dan Upaya Membersihkan*. Jawa Pos.
- Chudori, L. S. . (2024). *Namaku Alam*. Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).
- Cribb, R. B. . (2000). *Historical atlas of Indonesia*. Curzon.
- Darliani, S., Syukur, L. O., & Sahidin, L. O. (2024). Fakta Cerita Dan Nilai Sosial Dalam Novel *Namaku Alam* Karya Leila S. Chudori. *Jurnal Pendidikan*

- Bahasa*, 13(1), 1–16.
- Foulcher, Keith. (1980). *Pujangga Baru: literature and nationalism in Indonesia, 1933-1942*. [Flinders University of South Australia].
- Goffman, Erving. (2009). *Stigma*. Simon and Schuster.
- Halbwachs, Maurice., & Coser, L. A. . (2020). *On Collective Memory*. University of Chicago Press.
- Husna, J., Kasnadi, K., & Ismail, A. N. (2025). Konflik Batin Tokoh Utama dalam Novel Namaku Alam Karya Leila S. Chudori. *LEKSIS: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 5(1). <https://doi.org/10.60155/leksis.v5i1.529>
- Laurenson, D. T. ., & Swingewood, Alan. (1972). *The sociology of literature*. MacGibbon and Kee.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: 2nd ed*. SAGE Publications.
- Purnamasari, N. Made. (2016). *Kalamata*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suwandhi, E. A., & Raharjo, R. (2024). KEPRIBADIAN ID TOKOH UTAMA DALAM NOVEL NAMAKU ALAM KARYA LEILA S. CHUDORI. *Bapala: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 11(1), 1–13.
- Tohari, A. (2022). *Ronggeng Dukuh Paruk* (19th ed.). PT Gramedia.
- Wahyuningroem, S. L. (2013). Seducing for Truth and Justice: Civil Society Initiatives for the 1965 Mass Violence in Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 32(3), 115–142. <https://doi.org/10.1177/186810341303200306>
- Wellek, R., & Warren, A. (1994). *Theory of literature*. Harcourt Brace & Company.